

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERHADAP INFRASTRUKTUR TRASMIGRASI
DI DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**

Kasnayati¹, Nurjannah Nonci², Sapri³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: kasnayatikasmi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the planning process of transmigration infrastructure development and to examine the role of local government in supporting infrastructure development in Lagading Village. This research uses the theoretical perspective of Conyers and Hills (1994), which emphasizes the importance of planning as a social, participatory process based on community needs. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research informants were selected using a purposive sampling technique, involving village government officials, community leaders, members of the Village Consultative Body (BPD), and transmigration communities. Data analysis refers to the stages proposed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that infrastructure development planning in Lagading Village has involved the participation of the village government and the community. However, there are still several obstacles, including coordination problems, limited resources, and development needs that have not been fully accommodated. Therefore, the role of local government is highly needed in policy formulation, budgeting, supervision, and inter-agency coordination to support the successful implementation of infrastructure development in the village.

Keywords: Development planning, Transmigration infrastructure, Role of local government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan pembangunan infrastruktur transmigrasi serta mengidentifikasi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Lagading. Dalam penelitian ini, digunakan teori perspektif Conyers dan Hills (1994) yang menekankan pentingnya perencanaan sebagai proses sosial, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat transmigrasi. Analisis data mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading telah melibatkan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan keinginan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung lancarnya pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Kata Kunci: Perencanaan pembangunan, Infrastruktur transmigrasi, Peran pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur menjadi salah satu komponen fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan karena berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi, sosial,

maupun pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan antarwilayah, dan menurunkan efektivitas pelayanan publik.

Pembangunan infrastruktur memiliki posisi yang sangat strategis pada kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi pada umumnya merupakan wilayah yang baru berkembang dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif. Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, sanitasi, irigasi, listrik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kawasan transmigrasi mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal yang menentukan arah kebijakan, prioritas program, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat, mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara berkelanjutan.

Conyers dan Hills menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses sosial yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Perencanaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis penyusunan program, tetapi juga sebagai proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor pembangunan lainnya. Pendekatan partisipatif tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas keputusan pembangunan karena aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan perencanaan pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, RPJM Desa, dan RKP Desa. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Selain pemerintah daerah, partisipasi masyarakat juga menjadi indikator utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Keterlibatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), forum konsultasi publik, maupun mekanisme partisipatif lainnya memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat secara langsung. Partisipasi tersebut juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan sehingga mendukung keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kawasan transmigrasi yang terus melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pembangunan seperti jalan desa, jaringan drainase, sarana air bersih, dan fasilitas umum telah dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan desa. Namun demikian, keberhasilan pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan. Perencanaan yang kurang optimal berpotensi menyebabkan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlambatan pelaksanaan program, pemborosan anggaran, serta rendahnya kualitas infrastruktur yang dihasilkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan, tetapi juga menganalisis peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, koordinasi antaraktor, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan pada kawasan transmigrasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai praktik perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pembangunan pada kawasan transmigrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading sebagai kawasan transmigrasi dengan menggunakan perspektif teori perencanaan pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Conyers dan Hills. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi peran pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik dan perencanaan pembangunan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan pada kawasan transmigrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses perencanaan pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi, khususnya di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif melalui perspektif para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Lokasi penelitian berada di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Desa Lagading merupakan kawasan transmigrasi yang secara aktif melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, drainase, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, desa ini memiliki karakteristik kelembagaan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat yang relevan untuk mengkaji proses perencanaan pembangunan infrastruktur.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa. Informan terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat lokal dan masyarakat transmigran. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan perencanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan, bentuk partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen resmi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pembangunan desa, arsip foto, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan kondensasi data dengan memilih, mengelompokkan, serta menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan temuan yang kredibel.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu diterapkan melalui pengumpulan data pada

waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada kriteria trustworthiness yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lagading

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat transmigran melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan skala prioritas, serta menyusun program pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengakomodasi prinsip partisipasi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Conyers dan Hills (1994) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan karena program yang disusun berasal dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Infrastruktur

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur melalui penyalarsan kebijakan, pembinaan pemerintah desa, koordinasi lintas sektor, serta dukungan pendanaan. Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan secara terpadu.

Temuan ini mendukung pendapat Siagian (2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Semakin baik koordinasi antar lembaga pemerintah, semakin efektif pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Desa Lagading. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan pembangunan melalui forum Musrenbangdes sehingga program yang ditetapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan kualitas perencanaan, partisipasi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang telah dibangun sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar proses perencanaan menjadi lebih inklusif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putra dan Mursyidah (2023) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur desa.

Faktor Pendukung dan Kendala Perencanaan

Keberhasilan perencanaan pembangunan di Desa Lagading didukung oleh adanya komitmen pemerintah desa, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pelaksanaan Musrenbangdes sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta kondisi geografis kawasan transmigrasi yang menyebabkan pembangunan harus dilakukan secara bertahap.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh proses penyusunan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah dan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading dipengaruhi oleh sinergi antara peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Temuan ini memperkuat teori Conyers dan Hills bahwa pembangunan yang partisipatif akan menghasilkan perencanaan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Proses perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan skala prioritas pembangunan, serta menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran desa. Peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan perencanaan melalui penyalarsan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pembinaan, dan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, partisipasi masyarakat memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun tingkat keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar proses perencanaan menjadi lebih inklusif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan didukung oleh koordinasi antar pemangku kepentingan dan komitmen pemerintah desa, sedangkan keterbatasan anggaran, tingginya kebutuhan infrastruktur, serta kondisi geografis kawasan transmigrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi dapat berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abe, D. M., Nugroho, R. S., Kodoatie, R. J., Sipil, J. T., Teknik, F., Diponegoro, U., Nunggal, K. K., Bogor, K., & Cileungsi, S. (2015). *Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Pada Daerah Non-Cat Di Das Bekasi*. 4, 250–262.
- Dan, K., Permukiman, S., & Transmigran, G. K. (N.D.). *Transmigrasi Di Provinsi Jambi*.
- Fitrianti, A. A. (2022). *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur*. 6(1), 47–64.
- Grigg, N. S. (N.D.). *And Stormwater Infrastructure*.
- Hansen, S. (2022). *Investigasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur : Pergeseran Paradigma Dan*. 1(2020), 56–65.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020–2024*. (2024). 2024.
- Masyarakat, P., Perencanaan, D., Ikbali, M., & A, A. J. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang 1*. V(1), 581–588.
- Moderat, J. (2019). = 4,357 > T. 5, 1–17.
- Ningsih, R. V. (2021). *Journal Of Social And Policy Issues Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja*. 3.

- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo. (2021). 2021.
- Tp, J., & Oktober, M. (2012). Vol. 5 No. 2. 5(2).
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement* (4th Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. Dan Saldaña, J. (2013) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edn. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Conyers, D. Dan Hills, P. (1994) *An Introduction To Development Planning In The Third World*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, A., & Mursyidah, L. (2023). *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Tropika. (2025). *Akselerasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Kelembagaan Multipihak*. Jurnal Pembangunan Wilayah.
- Putra, K. W., & Mursyidah, L. (2023). *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*. 245–253.
- Tropika, B. (2025). *Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*. 7(4).
- Bumi, U., & Tidore, H. (2023). *Ilomata International Journal Of Social Science*. 4(2), 313–325.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Jakarta.